



**INSPEKTORAT
PROVINSI DKI JAKARTA**

LAPORAN FINAL SURVEI ZONA PEMBANGUNAN INTEGRITAS



JUNI 2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Ruang Lingkup.....	2
1.4 Lokasi dan Waktu Kegiatan.....	2
BAB II METODOLOGI SURVEI.....	3
2.2 Target Populasi.....	3
2.3 Penentuan Sampel.....	3
2.4 Metode Analisis.....	5
2.3 Metode Pencacahan.....	5
2.5 Pengolahan Data dan Analisis Survei.....	6
2.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.....	7
2.5 Personil Kegiatan.....	8
BAB III KUESIONER SURVEI.....	9
3.1 Demografi Responden.....	9
3.2 Instrument Indeks IPKP dan IPAK.....	9
3.3 Pertanyaan Terbuka.....	11
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	12
4.1 Demografi Responden.....	12
4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Hasil Survei.....	13
4.3 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).....	14
4.4 Hasil Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK).....	15
4.5 Hasil Perbandingan Nilai Kualitas Pelayanan (IPKP) (Maret Vs Juni Tahun 2024)....	17
4.6 Hasil Perbandingan Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK) (Maret Vs Juni Tahun 2024) ..	18
4.7 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Per Bidang.....	19
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	20
5.1 Kesimpulan.....	20
5.2 Saran.....	20

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Daftar 55 Target Responden Survei.....	3
Tabel 2. 2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	7
Tabel 2. 3 Personil Kegiatan.....	8
Tabel 3. 1 Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).....	10
Tabel 3. 2 Kuesioner Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	11
Tabel 4. 1 Sebaran Demografi Responden	12
Tabel 4. 2 Hasil Uji validitas.....	13
Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Reliabilitas.....	14
Tabel 4. 4 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).....	14
Tabel 4. 5 Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	15
Tabel 4. 6 Perbandingan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)	17
Tabel 4. 7 Perbandingan Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	18
Tabel 4. 8 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Per Bidang	19
Tabel 5. 1 Saran Per Bidang	21

Daftar Gambar

Gambar 4. 1 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP).....	15
Gambar 4. 2 Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	16
Gambar 4. 3 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Per Bidang.....	19
Gambar 5. 1 Saran	20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

- **Visi**

Menjadi Lembaga Pengawas Internal Terdepan Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- **Misi**

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Terpercaya .
2. Mengembangkan Sistem Pengawasan Untuk Menjamin Mutu Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.
3. Penguatan Instrumen Pengawasan Terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat.
4. Mewujudkan Lingkungan Kerja Yang Solid dan Kondusif.
5. Meningkatkan Pembinaan Terhadap Instansi dan Koordinasi Dengan Stakeholder.

Pelayanan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja suatu instansi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas menjadi penting dalam menciptakan tata kelola yang baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi sebuah instansi untuk memahami persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Survei Zona Pembangunan Integritas dan Survei persepsi kualitas pelayanan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data mengenai persepsi pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai kepuasan, harapan, serta tingkat kepentingan yang diberikan pada berbagai aspek pelayanan publik yang diberikan.

Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan survei oleh konsultan, akan dibentuk tim pendamping pelaksanaan survei INSPEKTORAT DKI JAKARTA yang terdiri dari PSMK dan satker pemilik IKU Indeks. Tim pendamping akan menyiapkan materi survei yang berkaitan dengan IKU Indeks dan memberikan pembekalan mengenai bisnis proses masing-masing satker tersebut untuk menjadi bahan bagi konsultan survei dalam penyusunan kuesioner indeks. Konsultan mampu memberikan masukan dan arahan terkait metode survei dan pengolahan data yang dapat menghasilkan kevalidan baik dari sisi data maupun Analisa hasil

survei. Selain itu, keberadaan konsultan survei juga diharapkan bisa memberikan bimbingan teknis bagi tim pendamping pelaksanaan survei INSPEKTORAT DKI JAKARTA dalam hal pemanfaatan laporan hasil survei.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan survei adalah :

- a. Untuk mendapatkan hasil pengukuran indeks persepsi kualitas pelayanan (IPKP) 2024 yang obyektif, komprehensif dan berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh satker terkait untuk lebih meningkatkan kinerjanya;
- b. Untuk mendapatkan hasil pengukuran indeks persepsi anti korupsi (IPAK) tahun 2024 yang obyektif, komprehensif dan berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh satker terkait untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
- c. Mengetahui interpretasi (cara membaca) indeks yang didapat.
- d. Memberikan rekomendasi yang bersifat strategis dari hasil survey.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a Melakukan perumusan pelaksanaan survei yang meliputi penentuan metode, indikator kepuasan, penyusunan kuesioner, pemilihan dan penentuan jumlah sampel, penentuan tempat & waktu pelaksanaan dan termasuk juga pelaksanaan survei.
- b Melakukan pengumpulan data dari sampel responden internal dan eksternal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Responden internal adalah pegawai INSPEKTORAT DKI JAKARTA yang terdiri atas Pimpinan, JFT dan Pelaksana. Sedangkan responden eksternal adalah Perangkat Daerah, BPK, BPK, Itjen Kemendagri, dan Stakeholder lainnya.
- c Melakukan pengolahan data perhitungan indeks dan penarikan kesimpulan
- d Menyusun laporan hasil survei secara keseluruhan.
- e Memberikan bimbingan teknis terkait penyajian laporan hasil survei kepada tim pendamping pelaksanaan survei INSPEKTORAT DKI JAKARTA.
- f Melakukan presentasi atas hasil survei di hadapan Pimpinan

1.4 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan survey Pembangunan zona integritas Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan indeks kualitas pelayanan berada di wilayah DKI Jakarta. Waktu pengerjaan adalah 30 hari kerja. Waktu survei dilaksanakan pada tanggal 15 – 20 Juni 2024.

BAB II METODOLOGI SURVEI

2.2 Target Populasi

Target populasi adalah kelompok individu yang menjadi subjek penelitian atau survei. Dalam konteks survei ini, target populasi adalah seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang memiliki akses terhadap pelayanan inspektorat baik dari internal maupun eksternal Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Dalam penentuan target populasi, perlu mempertimbangkan batasan dan kriteria yang relevan dengan tujuan survei, seperti kategori responden yang menjadi fokus Inspektorat Provinsi DKI Jakarta survei, periode waktu penggunaan layanan, atau jenis layanan yang tersedia. Pemilihan target populasi yang tepat akan mempengaruhi hasil survei yang valid dan representatif.

2.3 Penentuan Sampel

Penentuan sampel adalah proses memilih sebagian populasi untuk dijadikan sampel survei. Dalam survei ini, penentuan sampel perlu dilakukan karena tidak mungkin mengumpulkan data dari seluruh Pegawai dan Mahasiswa yang menggunakan layanan kampus. Sampel dalam survei ini ditentukan secara *purposive sampling*, yaitu dengan memilih responden yang dianggap representatif dari target populasi. Sebanyak 55 responden diambil secara acak dari populasi yang memenuhi kriteria sebagai sampel survei. Kriteria pemilihan responden adalah mereka yang pernah menggunakan layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam jangka waktu 3 bulan terakhir (April, Mei dan Juni). Pemilihan sampel yang tepat juga perlu mempertimbangkan ukuran sampel yang sesuai dengan populasi yang diambil, sehingga dapat meminimalkan bias dan *error* dalam hasil survei. Semakin besar ukuran sampel, semakin akurat hasil survei, namun semakin besar juga biaya dan waktu yang diperlukan. Berikut tabel sebaran target responden untuk survey bulan Juni 2024

Tabel 2. 1 Daftar 55 Target Responden Survei

No	Bidang	Asal Lembaga
1	Bidang 1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2	Bidang 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta
3	Bidang 1	Pemerintah Kota Administratif Jakarta Selatan
4	Bidang 1	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
5	Bidang 1	Badan Kepegawaian Daerah
6	Bidang 1	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat
7	Bidang 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8	Bidang 1	Biro Umum dan Administrasi - Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
9	Bidang 1	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta
10	Bidang 1	Biro Hukum - Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11	Bidang 1	Pemerintah Kota Administratif Jakarta Pusat
12	Bidang 1	Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
13	Bidang 1	Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur

No	Bidang	Asal Lembaga
14	Bidang 1	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
15	Bidang 1	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
16	Bidang 1	Biro Pemerintahan - Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
17	Bidang 1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
18	Bidang 1	Biro Kepala Daerah - Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
19	Bidang 1	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi - Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
20	Bidang 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
21	Bidang 1	Pemerintah Kota Administratif Jakarta Utara
22	Bidang 2	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
23	Bidang 2	Biro Perekonomian dan Keuangan
24	Bidang 2	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
25	Bidang 2	PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk
26	Bidang 2	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
27	Bidang 2	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta
28	Bidang 2	Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
29	Bidang 2	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
30	Bidang 2	PT Transportasi Jakarta
31	Bidang 2	PT MRT Jakarta
32	Bidang 2	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
33	Bidang 2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
34	Bidang 3	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
35	Bidang 3	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
36	Bidang 3	Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
37	Bidang 3	Biro Kerja Sama Daerah - Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
38	Bidang 3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
39	Bidang 4	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
40	Bidang 4	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
41	Bidang 4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
42	Bidang 4	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup - Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
43	Bidang 4	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
44	Bidang 4	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
45	Bidang 4	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
46	Bidang 5	Dinas Kebudayaan
47	Bidang 5	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
48	Bidang 5	Biro Pendidikan Mental dan Spiritual - Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
49	Bidang 5	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
50	Bidang 5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
51	Bidang 5	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
52	Bidang 5	RSUD PASAR MINGGU
53	Bidang 5	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
54	Bidang 5	Biro Kesejahteraan Sosial - Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
55	Bidang 5	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

2.4 Metode Analisis

Metode analisis adalah teknik untuk menganalisis dan mengolah data survei menjadi informasi yang berguna dan dapat dipahami. Dalam survei ini, metode analisis yang dapat digunakan adalah :

1. Pengujian validitas dan Reliabilitas dari hasil pengisian survey.

Uji Validitas merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat keefektifan suatu alat ukur atau media ukur untuk memperoleh data. Pengujian digunakan untuk mengukur seberapa efektif suatu kuesioner untuk memperoleh data, lebih tepat untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kuesioner.

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Sehingga uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Alat ukur dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Biasanya sebelum dilakukan uji reliabilitas data, dilakukan uji validitas data. Hal ini dikarenakan data yang akan diukur harus valid, dan baru dilanjutkan dengan uji reliabilitas data. Namun, apabila data yang diukur tidak valid, maka tidak perlu dilakukan uji reliabilitas data.

2. Analisis statistik deskriptif.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari survei dalam bentuk angka dan grafik, seperti rata-rata, median, modus, dan distribusi data. Dalam konteks survei ini, analisis statistik deskriptif dapat digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai IPAK, IPKP, dan nilai survei. Selain itu, dapat juga digunakan teknik grafik, seperti diagram batang untuk memvisualisasikan data survei. Setelah data survey dianalisis, hasil analisis dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan memperbaiki aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Hasil analisis juga dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi atau tindak lanjut untuk perbaikan layanan ke depannya.

2.3 Metode Pencacahan

Metode pencacahan atau teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi yang lebih besar. Dalam survei ini, teknik sampling yang digunakan adalah *convenience sampling* atau pengambilan sampel yang praktis. Dalam *convenience sampling*, responden dipilih berdasarkan ketersediaan dan kemudahan dalam memilih responden. Dalam survei ini, responden dipilih berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas mereka sebagai penerima layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta . Oleh karena itu, *convenience sampling* dipilih karena praktis dan efektif untuk mengumpulkan data dari

populasi yang terbatas, seperti mahasiswa sebagai penerima layanan. Namun, *convenience sampling* juga memiliki kelemahan yaitu dapat menghasilkan sampel yang tidak representatif karena responden dipilih berdasarkan kemudahan dan ketersediaan. Oleh karena itu, hasil survei ini perlu dianalisis dengan hati-hati dan perlu dilakukan pengecekan terhadap karakteristik responden yang terpilih.

2.5 Pengolahan Data dan Analisis Survei

a. Proses pemeriksaan data (*cleaning*)

Pada tahapan ini dilakukan proses pemeriksaan data hasil survei.

Pemeriksaan data dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain:

- 1) Memeriksa kuesioner yang masuk apakah layak untuk diproses atau *drop*, bilamana jawaban tidak lengkap;
- 2) Memeriksa kelengkapan dan kejelasan jawaban;
- 3) Memeriksa konsistensi antar jawaban dan relevansinya.

b. Proses Pengkodean data

Tahapan selanjutnya adalah memberi kode data dimana setiap pertanyaan dan pilhan jawaban diberikan kode untuk memudahkan dalam pengolahan data.

c. Proses tabulasi data

Proses tabulasi data adalah proses data *entry* atau memasukkan seluruh data kuesioner yang terdiri bagian A (Data Responden), bagian B (Pertanyaan Penilaian dan Pertanyaan Persetujuan) serta bagian C (Pertanyaan Masukan). Proses perhitungan data diolah adalah Program *Microsoft Excell* dan SPSS.

d. Proses Analisa data

Proses analisis data survei kepuasan mitra pengadaan barang dan jasa ini di menggunakan metode Deskriptif, Uji Validitas dan Reliabilitasm dan Perhitungan Indeks yang disederhanakan .

Langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembobotan pilihan jawaban yang tersedia berdasakan skala likert 4 (empat) point.
- 2) Perhitungan Indeks Kepuasan dengan menggunakan total skor jawaban responden. Penggunaan total skor untuk menghindari penggunaan nilai rata-rata , karena skala data yang digunakan adalah ordinal sehingga tidak cocok menggunakan rata-rata. Perhitungan indeks kepuasan sebagai berikut:

$$Skor\ Index\ (\%) = \frac{\sum_{i=1}^n Si \times fi}{4 \times p}$$

Keterangan :

Si = skor pilihan 1, 2, 3 dan 4

fi = total frekuensi masing-masing pilihan Si

p = total responden

2.4 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 2. 2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	M-1	M-2	M-3	M-4
1	Mendiskusikan lingkup pekerjaan dengan tim pendamping dan persiapan pelaksanaan survei INSPEKTORAT DKI JAKARTA				
2	Diskusi (brainstorming) dengan key person untuk membangun model kepuasan dan kuesioner internal dan eksternal.				
3	Finalisasi model kepuasan dan penjelasan kepada tim pendamping				
4	Finalisasi kuesioner				
5	Persiapan dan pelaksanaan pengumpulan data survei dari responden				
6	Pengolahan data survei dan penyusunan laporan hasil survei				
7	Penyerahan dan penjelasan hasil survei kepada tim pendamping pelaksanaan survei Inspektorat DKI Jakarta				
8	Penyerahan dan presentasi laporan pendahuluan				
9	Penyerahan laporan dwi mingguan				
10	Penyerahan laporan hasil survei dan presentasi				

2.5 Personil Kegiatan

Tabel 2. 3 Personil Kegiatan

Uraian Personil	Pendidikan/ Pengalaman	Jumlah Orang	Jumlah Hari	Uraian Tugas Pekerjaan
Tenaga Ahli				
Ketua Peneliti Utama	S2/S3 (9 tahun)	1	30	Ketua Peneliti Utama bertindak sebagai Project Director yang bertanggung jawab terhadap design dan pendekatan survei, perencanaan resource/orang yang terlibat dalam survei, mengarahkan tim yang terlibat, merumuskan analisa dan rekomendasi atas hasil survei.
Anggota Peneliti Utama	S2 (9 tahun)	1	30	Anggota Peneliti Utama membuat design dan pendekatan survei, merencanakan resource/orang yang terlibat dalam suatu survei, mengarahkan tim yang terlibat, merumuskan analisa dan rekomendasi atas hasil survei.
Supervisor Surveyor	S2 (7 tahun)	1	30	Supervisor bertindak sebagai Project Manager yang bertanggung jawab dalam penulisan proposal, mengatur/mengarahkan executive dalam survei, memonitor schedule pelaksanaan survei, dan bertanggung jawab dalam analisa dan pembuatan laporan.
Tenaga Pendukung				
Surveyor Lapangan	SMA/SMK (7 tahun)	5	7	Surveyor lapangan adalah petugas survei yang melakukan pengumpulan data/informasi di lapangan berdasarkan desain dan metodologi yang telah ditetapkan untuk kebutuhan survey.

BAB III KUESIONER SURVEI

Kuesioner terdiri atas serangkaian pertanyaan yang diberikan kepada target sampel, atau sekelompok orang, untuk mengumpulkan data. Merancang kuesioner harus dilakukan setelah maksud dan tujuan penelitian diselesaikan, yaitu setelah jelas informasi atau data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mengumpulkan data. Kuesioner harus dirancang sedemikian rupa sehingga jelas, mudah digunakan, serta informasi dapat diekstraksi dengan mudah dan akurat untuk input dan analisis data.

Kuesioner dapat dirancang oleh peneliti atau dapat pula berdasarkan kuesioner yang sudah tervalidasi. Kuesioner harus dapat mewakili informasi yang ingin diukur dalam penelitian. Jenis data yang dapat dikumpulkan menggunakan kuesioner bisa berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Kuesioner dapat menghasilkan hasil yang valid dan bermakna jika pertanyaannya jelas, tepat dan ditanyakan secara konsisten kepada semua responden. Oleh karena itu, pertimbangan yang cermat perlu diberikan pada desain kuesioner. Kuesioner yang dirancang dengan baik dapat membantu mengurangi kesalahan pengamatan dan pemrosesan sampel penelitian. Kuesioner yang akan disusun terdiri atas :

1. Demografi Responden
2. Indikator/Pertanyaan penyusun indeks IPKP dan IPAK
3. Pertanyaan terbuka berupa saran dan masukan

3.1 Demografi Responden

Demografi responden terdiri atas Pendidikan, Usia, Jenis Kelamin , dan Lama Bekerja.

3.2 Instrument Indeks IPKP dan IPAK

Fokus pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (SPKP). Survei IPAK dan IPKP dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) di setiap satuan kerja.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta meminta pendapat responden mengenai beberapa hal terkait kualitas dan integritas pemberian pelayanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Responden diminta memberi nilai antara 1 - 4 pada setiap pernyataan, di mana semakin

banyak yang menjawab bintang berupa poin 4 menunjukkan bahwa responden semakin setuju bahwa kualitas pelayanan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta semakin baik, sedangkan apabila memberikan bintang 1 berupa poin 1 berarti pelayanan semakin buruk. Beberapa daftar pertanyaan Kuesioner Survei Persepsi Kualitas Pelayanan ZI-WBK, sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Kuesioner Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

No	Pertanyaan Kuesioner	Pilihan Jawaban				Alasan Memberi Nilai STB/TB
		Sangat Tidak Baik (STB)	Tidak Baik (TB)	Baik (B)	Sangat Baik (SB)	
1	Informasi Pelayanan pada unit layanan i di inspektorat provinsi DKI Jakarta tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik					
2	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
3	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta mudah diikuti/dilakukan					
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
5	Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan					
6	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta memberikan kenyamanan/mudah digunakan					
7	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat					
8	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta mudah digunakan/diakses					

IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Beberapa daftar pertanyaan Kuesioner Survey Persepsi Korupsi, sebagai berikut .

Tabel 3. 2 Kuesioner Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

No	Pertanyaan Kuesioner	Pilihan Jawaban				Alasan Memberi Nilai STS/TS
		Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)	
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang /fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta					

3.3 Pertanyaan Terbuka

Pertanyaan terbuka meliputi Saran dan Masukan atas perbaikan dan juga alasan pemberian nilai rendah pada setiap pertanyaan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHSAN

4.1 Demografi Responden

Total target responden adalah 55 dengan persentase capaian responden sebanyak 55 responden atau 100%. Demografi responden meliputi Usia, Jenis Kelamin, Eselon, Pendidikan dan Lama Bekerja. Berikut adalah tabel sebaran demografi responden.

Tabel 4. 1 Sebaran Demografi Responden

Demografi		Frekuensi	Persen	Grafik
Usia 	30 - 35 Tahun	3	5%	
	36 - 40 Tahun	19	35%	
	41 - 45 Tahun	4	7%	
	46 - 50 Tahun	10	18%	
	> 50 Tahun	19	35%	
	Min	31		
	Max	60		
Jenis Kelamin 	Laki-laki	28	45%	
	Perempuan	27	55%	
Eselon 	Tidak ada Eselon	3	5%	
	II	2	4%	
	III A	5	9%	
	III B	1	2%	
	IV	33	60%	
	IVa	11	30%	
Pendidikan 	D3	0	0%	
	S1	18	33%	
	S2	36	65%	
	S3	1	2%	
Lama Bekerja 	≤ 10 Tahun	5	9%	
	11 - 20 Tahun	28	51%	
	> 20 Tahun	22	40%	
	Min	2		
	Max	35		

Target total responden untuk survei bulan Juni tahun 2024 sebanyak 55 dari perangkat daerah dengan capaian survei 100% yaitu total terkumpul 55 responden. Target total responden untuk tahun 2024 sebanyak 55 dari perangkat daerah dengan capaian survei 100% yaitu total terkumpul 55 responden. Berdasarkan demografi responden didominasi usia 36-40 tahun serta > 50 tahun (35%) dengan minimal usia 31 dan maksimal 60 tahun. Sebagian

besar responden berjenis kelamin Perempuan (55%), dengan eselon IV (60%). Pendidikan terbanyak adalah S2 (65%) serta lama bekerja terbanyak 11-20 tahun (51%).

4.2 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Hasil Survei

1. Hasil Pengujian Validitas

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid tidaknya suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut. Uji validitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Uji validitas

Variabel	Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Kesimpulan
IPKP	IPKP 1	0.8552	0,2706	Valid
	IPKP 2	0.7789		Valid
	IPKP 3	0.8250		Valid
	IPKP 4	0.7966		Valid
	IPKP 5	0.6012		Valid
	IPKP 6	0.7172		Valid
	IPKP 7	0.7266		Valid
	IPKP 8	0.8427		Valid
IPAK	IPAK 1	0.8173		Valid
	IPAK 2	0.8474		Valid
	IPAK 3	0.9019		Valid
	IPAK 4	0.8899		Valid
	IPAK 5	0.8899		Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2024.

Dari hasil pengujian validitas pada tabel diatas, kuesioner yang berisi dari 2 variabel yaitu ada Delapan (8) pernyataan yang mengukur IPKP dan ada Lima (5) pernyataan yang mengukur IPAK. Salah satu cara agar bisa mengetahui kuesioner mana yang valid dan tidak valid, kita harus mencari tau r tabelnya terlebih dahulu. Rumus dari r tabel adalah $df = N-2$ jadi $53-2 = 51$, sehingga $r\ tabel = 0,2706$. Dari hasil perhitungan validitas pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa $r\ hitung > r\ tabel$ artinya seluruh pernyataan yang mengukur IPKP dan IPAK sudah Valid.

2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas untuk mengukur konsisten atau tidak kuesioner dalam penelitian Sebelum dilakukannya pengujian reliabilitas harus ada dasar pengambilan keputusan yaitu alpha sebesar 0,60. Variabel yang dianggap reliabel jika nilai variabel tersebut lebih besar dari

>0,60 jika lebih kecil maka variabel yang diteliti tidak bisa dikatakan reliabel karena <0,60. Hasil dari pengujian reliabilitas pada variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
IPKP	0.933	Reliabel
IPAK	0.950	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2024.

Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dapat dilihat bahwa cronbach's alpha pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu 0,933 > 0,60 hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dinyatakan reliabel. Hasil dari uji reliabilitas pada variabel Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat dilihat bahwa *cronbach's alpha* pada variabel ini lebih tinggi dari pada nilai dasar yaitu 0,950 > 0,60 hasil tersebut membuktikan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner variabel Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dinyatakan reliabel.

4.3 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

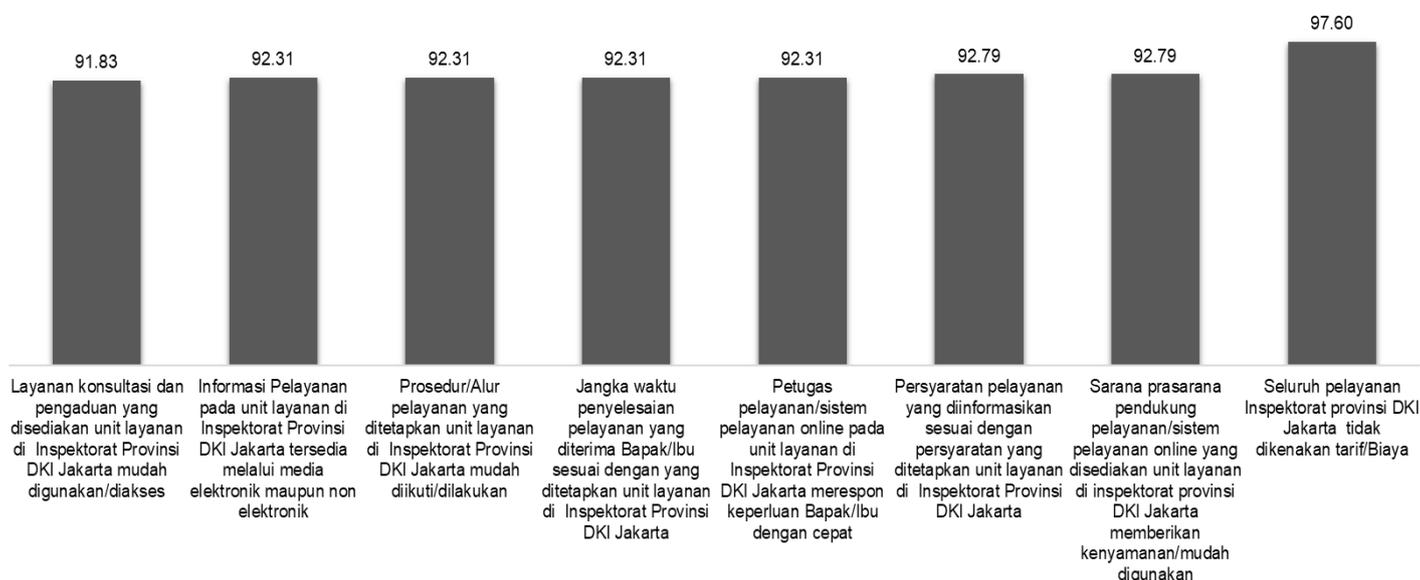
Hasil perhitungan nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dapat diuraikan pada tabel berikut yang sudah diurutkan berdasarkan penilaian terendah sampai dengan penilaian tertinggi:

Tabel 4. 4 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

No	Pelayanan	Nilai
1	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mudah digunakan/diakses	91.83
2	Informasi Pelayanan pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik	92.31
3	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mudah diikuti/dilakukan	92.31
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	92.31
5	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat	92.31
6	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	92.79
7	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta memberikan kenyamanan/mudah digunakan	92.79
8	Seluruh pelayanan Inspektorat provinsi DKI Jakarta tidak dikenakan tarif/Biaya	97.60
Nilai IPKP		93.03

Sumber: Data Primer Diolah, Juni 2024.

Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) secara keseluruhan memperoleh nilai 93.03. Nilai Tertinggi sebesar 97.60 Seluruh pelayanan Inspektorat provinsi DKI Jakarta tidak dikenakan tarif/Biaya. Nilai Terendah sebesar 91.83 terkait Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mudah digunakan/diakses.



Gambar 4. 1 Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

4.4 Hasil Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

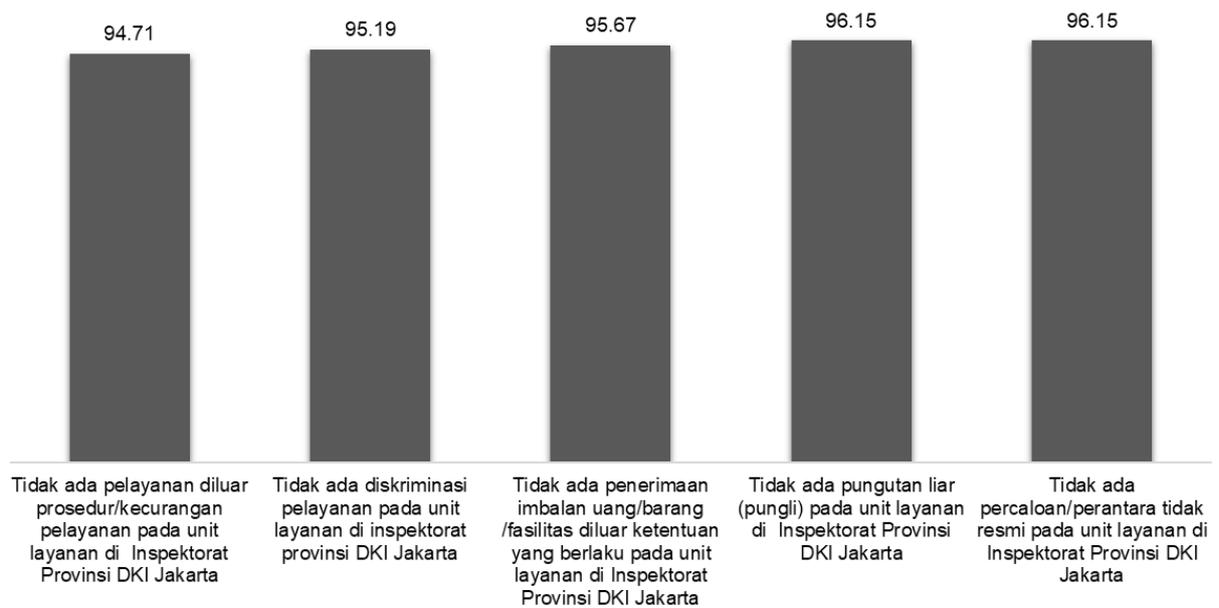
Hasil perhitungan nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dapat diuraikan pada tabel berikut yang sudah diurutkan berdasarkan penilaian terendah sampai dengan penilaian tertinggi:

Tabel 4. 5 Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

No	Anti Korupsi	Nilai
1	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	94.71
2	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan di inspektorat provinsi DKI Jakarta	95.19
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang /fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	95.67
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	96.15
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	96.15
Nilai IPAK		95.58

Sumber: Data Primer Diolah, Juni 2024.

Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK) secara keseluruhan memperoleh nilai 95.58. Nilai Tertinggi sebesar 96.15 terkait Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta serta Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Nilai Terendah sebesar 94.71 terkait kesesuaian bahwa Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 4. 2 Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

4.5 Hasil Perbandingan Nilai Kualitas Pelayanan (IPKP) (Maret Vs Juni Tahun 2024)

Tabel 4. 6 Perbandingan Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP)

No	Pertanyaan Kuesioner	Maret	Juni	%Perubahan
1	Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik	91.04	92.31	1.27 ↑
2	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini	91.98	92.79	0.81 ↑
3	Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan	91.51	92.31	0.80 ↑
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini	91.98	92.31	0.33 ↑
5	Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan	97.17	97.60	0.43 ↑
6	Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan	92.45	92.79	0.34 ↑
7	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat	91.98	92.31	0.33 ↑
8	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses	91.51	91.83	0.32 ↑
Nilai IPKP		92.45	93.03	0.58 ↑

Sumber: Data Primer Diolah, 2024.

- Nilai IPKP Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 0.58% , di bulan Maret sebesar 92.45 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 93.03.
- Pernyataan tentang Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik mengalami peningkatan sebesar 1.27%, di bulan Maret sebesar 91.04 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 92.31.
- Pernyataan tentang Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini mengalami peningkatan sebesar 0.81%, di bulan Maret sebesar 91.98 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 92.79.
- Pernyataan tentang Prosedur/Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan mengalami peningkatan sebesar 0.80%, di bulan Maret sebesar 91.51 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 92.31.
- Pernyataan tentang Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini mengalami peningkatan sebesar 0.33%, di bulan Maret sebesar 91.98 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 92.31.
- Pernyataan tentang Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan mengalami peningkatan sebesar 0.43%, di bulan Maret sebesar 97.17 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 97.60.

- Pernyataan tentang Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan mengalami peningkatan sebesar 0.34%, di bulan Maret sebesar 92.45 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 92.79.
- Pernyataan tentang Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat mengalami peningkatan sebesar 0.33%, di bulan Maret sebesar 91.98 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 92.31.
- Pernyataan tentang Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses mengalami penurunan sebesar 0.32%, di bulan Maret sebesar 91.51 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 91.83.

4.6 Hasil Perbandingan Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK) (Maret Vs Juni Tahun 2024

Tabel 4. 7 Perbandingan Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

No	Pertanyaan Kuesioner	Maret	Juni	%Perubahan
1	Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini	91.51	95.19	3.68 ↑
2	Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini	91.98	94.71	2.73 ↑
3	Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang /fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini	94.81	95.67	0.86 ↑
4	Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini	95.28	96.15	0.87 ↑
5	Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini	95.28	96.15	0.87 ↑
Nilai IPAK		93.77	95.58	1.81 ↑

- Nilai IPAK Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 1.81% , di bulan Maret sebesar 93.77 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 95.58.
- Pernyataan tentang Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini mengalami penurunan sebesar 3.68%, di bulan Maret sebesar 91.51 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 95.19.
- Pernyataan tentang Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini mwngalami penurunan sebesar 2.73%, di bulan Maret sebesar 91.98 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 94.71.
- Pernyataan tentang Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang /fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini mengalami peningkatan sebesar 0.86%, di bulan Maret sebesar 94.81 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 95.67.

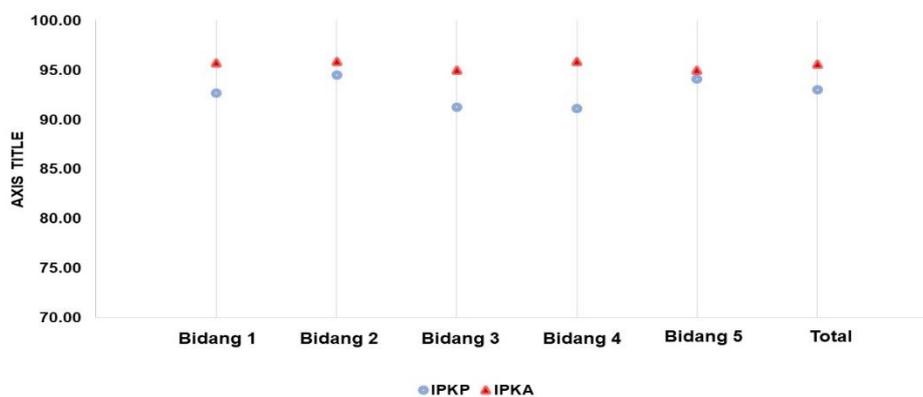
- Pernyataan tentang Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini mengalami peningkatan sebesar 0.87%, di bulan Maret sebesar 95.28 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 95.15.
- Pernyataan tentang Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini mengalami peningkatan sebesar 0.87%, di bulan Maret sebesar 95.28 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 96.15.

4.7 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Per Bidang

Hasil perhitungan Nilai IPKP dan IPKA per bidang dapat dilihat dari grafik. Nilai IPKP tertinggi sebesar 94.51 pada Bidang 2 dan IPKP terendah sebesar 91.15 Bidang 4. Nilai terendah selama dua triwulan di bulan Maret dan Juni berada pada bidang 4. Nilai IPKA tertinggi sebesar 95.83 pada Bidang 2 dan 4, serta IPKA terendah sebesar 95.00 pada Bidang 3.

Tabel 4. 8 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Per Bidang

Bidang	IPKP	IPKA
Bidang 1	92.66	95.75
Bidang 2	94.53	95.83
Bidang 3	91.25	95.00
Bidang 4	91.15	95.83
Bidang 5	94.10	95.00
Total	93.03	95.58



Gambar 4. 3 Hasil Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) Per Bidang

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

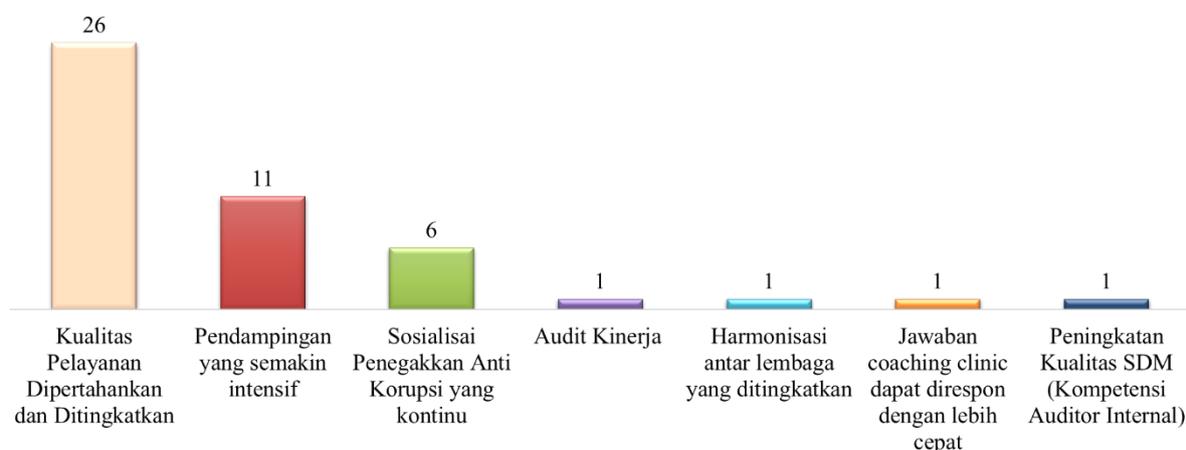
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Total target responden adalah 55 dengan persentase capaian responden sebanyak 55 responden atau capaian 100%.
2. Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner menunjukkan bahwa seluruh pernyataan yang mengukur IPKP dan IPAK sudah Valid dan reliabel.
3. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) secara keseluruhan memperoleh nilai 93.03.
4. Nilai IPKP Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 0.58% , di bulan Maret sebesar 92.45 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 93.03.
5. Nilai Persepsi Anti Korupsi (IPAK) secara keseluruhan memperoleh nilai 95.58.
6. Nilai IPAK Juni 2024 mengalami peningkatan sebesar 1.81% , di bulan Maret sebesar 93.77 dan saat ini penilaian bulan Juni sebesar 95.58.

5.2 Saran

Berikut adalah Saran dari seluruh responden yang memberikan saran terakit peningkatan kualitas pelayanan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.



Gambar 5. 1 Saran

Sebagian besar responden memberikan saran terakit peningkatan kualitas pelayanannya artinya harapan dari responden agar kualitas pelayanan selalu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Urutan kedua terbanyak terkait pendampingan yang lebih intensif. Selain itu diharapkan Ispektorat rutin mengadakan Sosialisasi anti korupsi , menjadi pendamping yang baik dalam memberikan solusi terbaik, tetap menjaga integritas dan konsistensi dalam pencegahan korupsi,lainnya terakit audit kinerja , harmonisasi antar Lembaga yang

ditingkatkan, jawaban yang lebih fast respon, serta peningkatan kualitas SDM dilihat dari sisi Kompetensi Audit Inetrnal. Berikut adalah sebaran saran per bidang hasil dari kuesioner :

Tabel 5. 1 Saran Per Bidang

Bidang	Mohon Berikan Saran dan Masukan yang berarti bagi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan dalam penegakan Anti Korupsi	
Bidang 1	➤ Semoga kedepannya jawaban coaching clinic dapat direspon dengan lebih cepat	
	➤ Tetap pertahankan kualitas pelayanan	
	➤ Kualitas Pelayanan dan Kinerja dalam penegakan Anti Korupsi sudah baik dan pertahankan kapabilitas SDM dalam penyelesaian masalah dari setiap SKPD dan UKPD secara tepat dan sesuai prosedur yg berlaku.	
	➤ Terus semangat dalam peningkatan kualitas pelayanan dan penegakan Anti Korupsi	
	➤ Tingkatkan kualitas pelayanan di Inspektorat	
	➤ Pembinaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat sudah baik, tingkatkan.	
	➤ Pencegahan diawal untuk dikedepankan dengan pendampingan dalam pelaksanaan	
	➤ Klinik konsultasi yg ada di Inspektorat agar sering di publish ke wilayah Kelurahan dan Kecamatan	
	➤ sudah baik	
	➤ Inspektorat Provinsi bisa menjadi garda terdepan bagi kemajuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	
	➤ bisa menjadi pendamping SKPD yg baik dan mempermudah proses pendampingan tanpa harus memberatkan dengan permintaan dokumen yg banyak kepada SKPD, serta mampu memberikan solusi dan menjadi pedoman bagi SKPD ketika ada hal2 dirasa perlu. sehingga tercipta suasana yg nyaman bagi SKPD untuk bisa berkonsultasi.	
	➤ Tingkatkan kualitas pelayanan di Inspektorat	
	➤ Pertahankan dan Lebih Baik Kedepannya	
	➤ Pelayanan yang diberikan sudah memenuhi prinsip Good Givernance and Clean Government..agar terus dipertahankan	
	➤ Sudah baik pelayanannya dan mohon dapat dipertahankan	
	➤ Seluruh layan sudah diberikan dengan baik dan sesuai, mohon untuk dipertahankan/ditingkatkan lagi	
	➤ mohon bimbinganya selalu	
	➤ Harmonisasi antara lembaga dan perangkat semakin ditingkatkan	
	Bidang 2	➤ Perbanyak Audit Kinerja di OPD sebagai langkah pencegahan korupsi
		➤ Tetap pertahankan kualitas pelayanan
➤ Diadakan nya sosialisasi tata cara konsultasi terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran di tingkat SKPD karena banyak pegawai yang mau konsultasi tp belum mengetahui mekanisme dan sarana yg tersedia, terima kasih		
➤ Sudah bagus agar dipertahankan		
➤ perlu dipertimbangkan membuka ruang diskusi antara auditor dan auditee pada awal tahun untuk topik topik yang perlu diangkat sebagai objek pemeriksaan		
➤ Tetap semangat dalam melakukan pembinaan kepada SKPD		
➤ dengan makin banyaknya penugasan, smoga tim inspektorat makin tangguh dan bermanfaat rangka peningkatan kualitas pelayanan dan dalam penegakan Anti Korupsi		
➤ Memperbanyak kegiatan pelatihan pengawasan atau pengendalian internal di BUMD		
➤ Disediakan ruang rapat yang lebih banyak agar Inspektorat DKI dapat memfasilitasi konsultasi yang lebih banyak		
➤ Dilakukan Rapat Per Triwulan bukan hanya untuk penyelesaian TL Rekomendasi Audit namun juga Update mengenai Kepatuhan LHKPN, Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuaan, Pengukuran EVKIN, Pengukuran QAR maupun IACM		
➤ Perlu sosialisasi ke BUMD-BUMD agar kami lebih memahami kebijakan pelayanan dan penegakan anti korupsi		
➤ Kinerja yang telah tercapai sampai dengan saat ini agar tetap dipertahankan		
Bidang 3	➤ Agar diadakan sosialisasi terkait penegakan Anti Korupsi secara kontinu	

Bidang	Mohon Berikan Saran dan Masukan yang berarti bagi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan dalam penegakan Anti Korupsi
	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inspektorat Prov DKI Jakarta sudah sangat responsif dalam setiap permasalahan yg kami sampaikan dan dapat memberikan solusi positif atas permasalahan tsb walaupun dgn keterbatasan jumlah SDM ➤ Kinerja sudah baik ➤ Mohon dibuka forum konsultasi skpd secara berkala ➤ Peningkatan kualitas SDM, kompetensi auditor internal yang berperan aktif dalam pelaksanaan APBD dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi. ➤ Langkah konkrit penindakan praktik korupsi yang terpublikasi secara masiv serta tindakan pencegahan korupsi secara berkala.
Bidang 4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Inspektorat sudah baik ➤ Tingkatkan lagi knowledge Auditor terutama tentang kewajiban dalam pembuatan kertas kerja audit. Pengangkatan jabatan auditor harus diseleksi kembali bukan seperti senioritas ➤ Tingkatkan kualitas pelayanan di Inspektorat ➤ Perlu diinformasikan atau disebarluaskan mengenai pelayanan-pelayanan di Inspektorat apa saja, dan perlu adanya usaha untuk meningkatkan kepercayaan ASN untuk menggunakan layanan-layanan dari Inspektorat
Bidang 5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kualitas pelayanan sudah sangat bagus. Agar dipertahankan dan ditingkatkan ➤ Tingkatkan kualitas pelayanan di Inspektorat ➤ Lebih intensif dalam pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi BPK ➤ Inspektorat agar menambah frekuensi jumlah pendampingan . Pendampingan tidak usah harus model konsultasi. pendampingan bisa dilakukan melalui kontak person, dengan saling berkomunikasi lewat telepon menanyakan kepada OPD . misalnya apakah di OPD saudara saat ini ada hal hal yang perlu di dampingi inspektorat. ➤ Tingkatkan kualitas pelayanan di Inspektorat ➤ Lebih ditingkatkan pelayanan ke SKPD sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan di SKPD ➤ Pelayanan di Inspektorat selama ini sudah baik dan sesuai perlu untuk dipertahankan kerjasama dengan Rumah Sakit. ➤ Tingkatkan kualitas pelayanan di Inspektorat ➤ Tingkatkan kualitas pelayanan di Inspektorat ➤ Mohon agar Inspektorat Provinsi bisa melakukan sosialisasi anti korupsi secara massive bukan hanya di tingkat dinas tapi juga ukpd di lingkungan dinas